

DAFTAR BACAAN

Buku

1. Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
2. Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
3. Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
4. C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, 2008.
5. Eddy Nurbaningsih, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.
6. Faried Ali dan Nurlina Muhidin, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
7. Fatkhurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin, *Memahami Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
8. Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
9. Harsono, *Hukum Tata Negara, Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1992.

10. Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, 1990.
11. Jimly Asshididique, *Perkembangan Baru Tentang Konsitusi dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktik*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018.
12. Kuntana Magnar, *Pokok-Pokok Pemerintah Daerah Otonom dan Wilayah Administraip*, Armico Bandung, 1984.
13. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
14. Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 1*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2007.
15. Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 2*, PT Kanisius, Yogyakarta, PT Kanisius, 2007.
16. Sri Winarsi, Wilda Prihatiningsih, *Pemerintahan Daerah*, Airlangga University Press, 2019.
17. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
18. Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press Kelompok Intrans Publising, Malang, 2016.
19. Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Malang, 2015.
20. Sirajudin dkk, *Legislatif Drafting*, Setara Press, Malang, 2015.

21. Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
22. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
23. Victor M. Situmorang, Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, PT Karya Unipress, 1994.

Perundangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Putusan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015
2. Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016

Jurnal

1. Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat terhadap Daerah (Kajian terhadap Peraturan Daerah "Bermasalah")*, Jurnal Hukum, No.23 Vo 10 Mei 2003: 28-45.

2. Wahyu Tri Hartomo, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota*, Jurnal Legislasi Indonesia Vo 15 No.2 – Juli 2018 : 27-39.
3. Soegiyono, *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/232>.